

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Selva Temalagi¹,
Fanny Monica Anakotta²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi: 1) Pemerintah Desa, memberikan pemahaman terkait dengan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban dana desa.

Populasi penelitian adalah aparatur desa di kabupaten Maluku Tengah. Sampel adalah Kepala Desa, Sekdes, Bendahara Desa dan Kepala seksi di 22 Desa Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Pulau Ambon. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan Teknik Purposive Sampling. Jenis data adalah data primer yang dikumpulkan melalui metode kuesioner yang disebar ke 110 responden, data yang dapat diolah sejumlah responden.

Metode Analisis Data menggunakan SEM-PLS. Hasil Penelitian menunjukkan: 1) penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal, Akuntabilitas

Abstract

The purpose of this study was to empirically examine the effect of financial statement presentation, financial statement accessibility, and internal control system on village fund management accountability. The results of the research are expected to be able to contribute to: 1) Village Government, providing an understanding related to the rules in managing village finances and accountability of village funds.

The research population is village officials in Central Maluku district. The sample is the village head, village secretary, village treasurer and section head in 22 villages in Central Maluku district located on Ambon Island. The sampling technique in this research uses the Purposive Sampling Technique. The type of data is primary data collected through a questionnaire method distributed to 110 respondents, data that can be processed by a number of respondents.

Data analysis method using SEM-PLS. The results of the study show: 1) the presentation of financial statements has a positive effect on the accountability of village fund management, 2) the accessibility of financial reports has a positive effect on the accountability of village fund management, 3) the internal control system has a positive effect on the accountability of village fund management.

Keywords: Presentation of financial statements, Accessibility, Internal Control, Accountability

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, email: selva_temalagi@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: monicfanny@gmail.com

PENDAHULUAN

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. BPKP (2015:1) menyatakan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa kurang lebih sebesar Rp 20,776 triliun kepada 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.

Berdasarkan peraturan Bupati Maluku Tengah no 34 tahun 2017, besaran ADD untuk desa-desa di Maluku Tengah juga dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Adapun besaran ADD untuk desa-desa di tiga kecamatan yakni salahutu, leihitu Barat dan Leihitu dalam kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Pulau Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Desa dengan Besaran ADD tahun 2017

Nama Desa	ADD (Rp)	Nama Desa	ADD (Rp)
Liang	948.039.408	Asilulu	872.677.847
Waii	892.010.305	Ureng	817.934.992
Tulehu	1.080.485.182	Negeri Lima	840.493.313
Tial	793.007.228	Seit	886.626.299
Tengah2	793.403.847	Kaitetu	836.030.697
Suli	906.561.383	Hila	847.030.750
Larike	837.783.136	Wakal	849.080.625
Wakasihu	797.323.497	Hitu Lama	805.139.457
Allang	844.315.378	Hitumessing	919.539.858
Liliboy	787.772.383	Mamala	790.202.219
Hatu	847.129.913	Morela	800.278.569

Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD. Namun, pencairan ke RKD baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja. Walaupun dana desa telah cair ke RKD, masalah lain yang berpotensi untuk mencuat adalah kesalahan dalam menyusun anggaran dan penyelewengannya. Persoalannya bukan semata lemahnya SDM dalam mengelola peruntukan dana desa, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa. Menghadapi hal tersebut, perlu diberikannya sejumlah program pembangunan kapasitas seperti pelatihan aparatur dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.). Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan yang berisi informasi berkaitan dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dialokasikan dana desa kurang lebih sebesar Rp 20,776 triliun ke seluruh desa di Indonesia, pemerintah kabupaten/kota berperan mengawasi pengelolaan dana tersebut. Masih rendahnya sumber daya manusia di desa secara langsung akan mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut akan memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian intern yang baik dan menyeluruh (Ramon, 2014). Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian baru. Penelitian ini mereplikasi penelitian Wahyuni dkk (2014) dengan hasil penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Juga merujuk pada penelitian Sande (2013) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta hasil penelitian Aliyah dan Nahar (2012) yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peneliti menambahkan variabel baru yaitu sistem pengendalian internal yang dirujuk dari Aramide

dan Bashir (2015), dan Ramon (2014) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 2) Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, 3) Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan menguji secara empiris; 1) pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) pengaruh aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas pengelolaan dana desa, 3) pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak: 1) Pemerintah Desa, memberikan pemahaman terkait dengan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban dana desa, 2) Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa

Kajian Teori

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Teori agensi berfokus pada biaya potensi konflik kepentingan antara pelaku dan agen, disebut sebagai *agency costs* (Pepper dan Gore, 2014). Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa. Selain itu, masyarakat dalam hal ini juga merupakan prinsipal, sehingga pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa tidak hanya kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga kepada masyarakat. Konsekuensi dari teori agensi adalah tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kompetensi yang memadai dari perangkat desa, yakni dalam hal penyajian, aksesibilitas laporan keuangan serta sistem pengendalian internal yang memadai.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan ndakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan. laporan keuangan. BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1). Relevan, 2) Andal. 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas bukan disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones *et al*, 1985). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Menurut Permendagri 113 laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses masyarakat.

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP 60 Tahun 2008, Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP terdiri atas unsur: 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, 5). Pemantauan pengendalian internal

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wahyuni dkk., 2014	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
2	Sande, 2013	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Variabel Dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyajian laporan keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi, 2) aksesibilitas laporan keuangan memiliki makna positif untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi.
3	Aliyah dan Nahar, 2012	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara	Variabel Dependen : Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas bidang laporan keuangan efek parsial atau bersama-sama positif pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
4	Ramon, 2014	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern	Hasil dari penelitian ini sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
5	Aramide dan Bashir, 2015	<i>The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria</i>	Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern	Hasil dari penelitian ini sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengembangan Hipotesis

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk

memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009: 159). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Wahyuni dkk (2014) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sande (2013) juga menemukan penyajian laporan keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi. Hal yang sama dikemukakan Aliya dan Nahar (2012) dalam penelitiannya bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan akses laporan keuangan tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Hasil penelitian Wahyuni dkk (2014) bahwa aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sande (2013) menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pegawai pemerintah daerah. Hasil analisisnya menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aliya dan Nahar (2012) menemukan bahwa aksesibilitas bidang laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

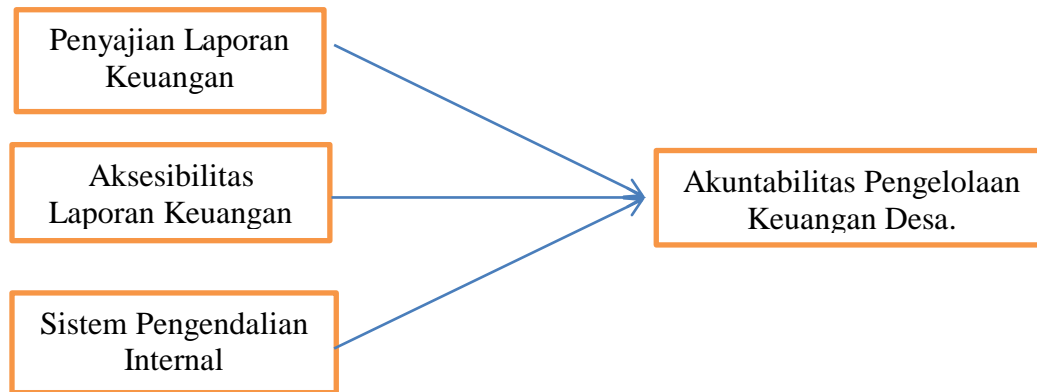
H2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Ramon (2014) menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat dengan hasil analisisnya menunjukkan system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Aramide dan Bashir (2012) juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian studi pengujian hipotesis (hypothesis testing study) untuk menguji pengaruh antar variabel. Menurut Wahyudin (2015: 110) studi pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi yang dalam penelitian ini adalah Aparatur/perangkat Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Maluku Tengah

Tabel 3 Jumlah Desa-Desa di Kecamatan- kecamatan Kabupaten Maluku Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Desa	No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Amahai	14	10	Nusalaut	7
2	Teon Nila Serua	16	11	Seram Utara Barat	13
3	Seram Utara	20	12	Teluk Elpatih	4
4	Banda	18	13	Leihitu Barat	5
5	Tehoru	10	14	Telutih	10
6	Saparua	7	15	Serut Timur Seti	12
7	Pulau Haruku	11	16	Serut Timur Kobi	12
8	Salahutu	6	17	Saparua Timur	10
9	Leihitu	11			

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Adapun kriteria sampel:

1. Desa- desa di kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Ambon. Mengingat keterbatasan waktu dan anggaran penelitian, sementara desa-desa di kabupaten Maluku Tengah tersebar luas di beberapa pulau dengan jarak tempuh yang jauh. Adapun desa yang dijadikan sampel seperti pada tabel 4.2 yang tersebar di 3 kecamatan yang terletak di Pulau Ambon yakni Salahutu, Leihitu Barat dan Leihitu

Tabel 4 Desa Sampel

No	Nama Desa	No	Nama Desa	No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Liang	7	Larike	13	Ureng	19	Hitu Lama
2	Waai	8	Wakasihu	14	Negeri Lima	20	Hitumessing
3	Tulehu	9	Allang	15	Seit	21	Mamala
4	Tial	10	Liliboy	16	Kaitetu	22	Morela
5	Tengah2	11	Hatu	17	Hila		
6	Suli	12	Asilulu	18	Wakal		

2. Responden adalah Aparatur/Perangkat Desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala seksi

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden atas beberapa item pertanyaan tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Data primer yang diperoleh menggunakan teknik kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada narasumber atau responden. Adapun penyebaran kuesioner secara langsung oleh tenaga lapangan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3). Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dandipertanggungjawabkan (Nurmuthmainnah, 2015). Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (Zeyn, 2011). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini menurut Zeyn (2011) adalah perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK 1, 2012). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan adalah pemenuhan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Menurut Nurmuthmainnah (2015) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi (terbuka dimedia massa, mudah diakses, ketersediaan informasi).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan dilingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Analisis data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode *Structural Equation Model-Partial Least Square* (SEM-PLS). Tahapan analisis menggunakan PLS-SEM setidaknya harus melalui lima proses tahapan dimana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya (Ghozali dan Latan 2012):

Model pengukuran (*measurement model*) atau outer model menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten untuk diukur (Ghozali, 2012). Tahap pertama dalam SEM-PLS adalah menilai *outer model*, yang memfokuskan pada pengujian validitas dan reliabilitas yang mempresentasikan setiap konstruk. Uji validitas convergent indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Sedangkan validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa manifest variabel konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi (Ghozali & Latan, 2012). Uji yang dilakukan pada model pengukuran atau *outer model* sebagai berikut:

1. *Convergent Validity* untuk menilai validitas convergent dilihat dari nilai *loading factor*, untuk indikator reflektif dikatakan tinggi jika nilai *loading factor* lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian, pada penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading factor* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2012). Konstruk dengan nilai *loading factor* kurang dari 0,50 harus didrop (dihapus) agar dapat menghasilkan model yang baik.
2. Untuk melihat *convergent validity* juga dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5.
3. *Discriminant Validity* yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model.
4. *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha*, dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70.
5. *Composite Reliability* untuk menilai *reliabilitas* konstruk yang nilai *composite reliability* harus lebih besar dari 0.7.

Model struktural atau *inner model* merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai *R-Square* 0.75, 0.50, 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate, lemah.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan pada tingkat reliabilitas yang digunakan adalah 90%, sehingga batas keakuratan sebesar 0,1. Dengan kriteria:

1. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel ($t\text{-statistik} < 1,96$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel ($t\text{-statistik} > 1,96$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di seluruh desa yang ada di Kabupaten Maluku Tengah di pulau Ambon sebanyak 22 desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur/Perangkat Desa sedangkan yang menjadi sampel adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala seksi berjumlah 110 orang responden. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 110 kuesioner. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan seperti pada tabel

Tabel 5 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	110	100%
Kuesioner kembali	79	71.8%
Kuesioner yang tidak kembali	31	28.2%
Kuesioner yang dapat diolah	79	71.8%

Sumber: Data primer diolah, 2019

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *SEM (structural equation modeling)* berbasis *partial least squares* dengan alat analisis data *SmartPLS 3.0*. Uji outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Jika dilihat dari loading factor maka ukuran model reflektif dikatakan bagus apabila nilai loading factor lebih dari 0,50. Konstruk dengan nilai banding loading factor kurang dari 0,50 harus dihapus atau didrop agar dapat menghasilkan model yang baik dari sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk mempunyai nilai *loading factor* di atas 0,5 dan signifikan (*t-statistic* lebih besar daripada *t* tabel). Penyajian laporan keuangan mempunyai 8 konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 dan signifikan lebih dari 1,96 (*t-statistic* lebih besar dari *t*-tabel), selanjutnya untuk aksesibilitas laporan keuangan mempunyai 3 konstruk, sistem pengendalian internal memiliki 7 konstruk yang memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,5 dan signifikan lebih dari 1,96 (*t-statistic* lebih besar dari *t*-tabel). Variabel laten akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mempunyai 7 konstruk yang memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,5 dan signifikan lebih dari 1,96 (*t-statistic* lebih besar dari *t*-tabel). Tetapi, penelitian ini masih dapat menerima nilai *loading factor* 0,50 sampai 0,60 sesuai dengan tahap pengembangan skala. Sehingga, indikator konstruk dengan nilai *loading factor (original sample)* yang kurang dari 0,5 harus dihapus (drop) agar mampu menghasilkan model yang lebih baik dari model sebelumnya. Variabel laten dikatakan valid jika nilai *AVE* harus lebih dari 0,5. Nilai *AVE* direkomendasikan harus lebih dari 0,5 mempunyai arti bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali dan Latan, 2012).

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa varriabel laten endogen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki *AVE* 0,544 sehingga bisa dikatakan valid karena nilai *AVE* lebih besar dari 0,50. Variabel laten eksogen yaitu penyajian laporan keuangan dengan nilai *AVE* sebesar (0,5040, aksesibilitas laporan keuangan dengan nilai *AVE* sebesar (0,630) dan sistem pengendalian internal dengan nilai *AVE* (0,543). Dilihat dari nilai *AVE* keseluruhan Average Variance Extacted (*AVE*) varriabel laten maka dapat diketahui bahwa untuk semua variabel laten adalah val.id karena memiliki nilai *AVE* di atas 0,50.

PLS SEM menggunakan program *SmartPLS 3.0* untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70.

Berdasarkan hasil olah data, menunjukkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang digunakan sangat tinggi, maka konstruk atau vaiabel dalam model penelitian ini telah

menjadi alat ukur yang fit dan semua pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing konstruk dalam penelitian merupakan pertanyaan yang reliabel. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing konstruk yang digunakan dalam model penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geiser Q-Square* untuk predictive relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. Penilaian model dengan PLS, dapat dimulai dengan melihat *R-square* untuk variabel laten dependen. Berdasarkan hasil pengujian, nilai *R-square* dari variabel laten dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah 0,483. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabilitas konstruk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dapat dijelaskan oleh konstruk dalam penelitian adalah sebesar 48,3% sementara 51,7% lainnya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* berbasis *variance* dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Penelitian ini menggunakan 1 variabel endogen (variabel independen) yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan 16 indikator.

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat *path coefficient* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai *t-statistic*. Signifikan parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai *t-statistic* dengan nilai *t-tabel*. Jika *T-statistic* lebih tinggi dibandingkan *T-tabel*, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Penelitian ini untuk tingkat keyakinan 90 persen (α 90 persen), maka nilai *T-table* untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*). Hasil pengujian dari responden dapat dilihat pada tabel 4.14.

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0.279 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2.770. Pengujian variabel penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan yang ada pada desa maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Hasil ini relevan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0.492 dengan nilai *t-statistic* sebesar 4.669. Pengujian variabel aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan desa bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu.

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah diterima. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0.178 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2.008. Pengujian variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu dengan adanya kontrol

dari pemerintah maka kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa akan terawasi serta dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Hipotesis satu (H1) diterima, yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) Hipotesis kedua (H2) diterima, yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 3) Hipotesis ketiga (H3) diterima, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Adapun keterbatasan penelitian ini: 1) Jawaban responden kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, karena menggunakan kuesioner, 2) Jarak tempuh antar desa di Maluku Tengah yang tersebar di pulau-pulau selain di Pulau Ambon, menyebabkan peneliti kesulitan menjadikan seluruh desa sebagai tempat penelitian terkait anggaran dan tenaga lapangan yang dipakai. Saran penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan teknik pengambilan data selain kuesioner dan memperluas objek penelitian.

Implikasi penelitian ini bagi pemerintah desa adalah dapat meningkatkan pengelolaan dana desa dengan mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan, agar penyerapan dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan ekonomi desa serta memberdayakan sumber daya manusia dan alam dan juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dikucurkan lewat pembangunan BUMDes.

REFERENSI

- Aliya dan Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 8(2): 97-189.
- Aramide, Sanusi Fasilat, dan Bashir, Musthapa Muhammed. 2015. The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management*. University of Utara Malaysia.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia-KSAP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan*. Jogiyanto, HM. 2011. *Konsep dan Aplikasi Struktural Equation Modeling*. Jogiyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jones, D. B, 1985." The Needs of Users of Go-vernmental Financial Reports". *Government Accounting Standards Board*.

- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi tiga. Yogyakarta: AMP YKPN.Latan, Hengki dan Ghozali Imam. 2012. *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS*
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratomo, Ario Wahyu. 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/emagz/media-keuanganjanuari-2016> diakses 02/05/16.
- Ramon, Dolly. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- _____. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. 2015. Peraturan Pemerintah No. 22 Pasal 29 tentang Pembagian Dana Desa.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Pemerintahan Desa.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- _____. 2014. Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- _____. 2014. Undang-Undang No.6 tentang Desa..
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Herawati Nyoman Trisna. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 2(1).

LAMPIRAN

Indikator Penelitian

Penyajian Laporan Keuangan

NO	PERNYATAAN
1	Menyajikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban.
2	Menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan.
3	Laporan keuangan disajikan tepat waktu dan kekeliruan dalam penggunaan dapat dicegah
4	Menyajikan penyajian laporan keuangan desa secara lengkap
5	Laporan keuangan yang kami hasilkan telah disajikan secara jujur dan wajar.
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material.
7	Laporan keuangan desa disajikan secara konsisten
8	Penyajian laporan keuangan desa menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna informasi.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

NO	PERNYATAAN
1	Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka melalui media massa
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa.
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa melalui internet (website).

Sistem Pengendalian Internal

NO	PERNYATAAN
1	Selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang

2	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas.
3	Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam Pemerintah desa.
4	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.
5	Memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran.
6	Pengeluaran uang pada pemdes selalu di dokumentasikan pada bukti pengeluaran kas
7	Adanya otorisasi atas aktivitas transaksi.
8	Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.
9	Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ <i>review</i> dan saran yang diberikan oleh Inspektorat

Akuntabilitas Keuangan

NO	PERNYATAAN
1	Penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran.
2	Penyusunan RKP-Desa untuk program dan kegiatan yan direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.
3	Pembuatan RKP-Desa memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran
4	Pengajuan anggaran disertai dokumen perencanaan dan penganggaran yang diajukan sebagai dasar penyusunan APB Des.
5	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang-undangan.
6	Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDes merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
7	Evaluasi kinerja keuangan memperhatikan prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari setiap program.
8	Evaluasi dalam kinerja keuangan dapat dilihat dari membandingkan anggaran dengan realisasinya.
9	Pencatatan belanja, pendapatan dan pembiayaan didasarkan pada kelengkapan bukti/dokumen pelaksanaan anggaran.
10	Laporan keuangan desa diperiksa oleh Inspektorat dan pemdes melakukan analisis laporan keuangan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran